

**DAMPAK DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA PERIMBANGAN
TERHADAP PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN
BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA
PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH
TAHUN 2013-2017**

***THE IMPACT OF SPECIAL AUTONOMY FUNDS AND BALANCED FUNDS ON
THE DEVELOPMENT OF THE HUMAN DEVELOPMENT INDEX WITH CAPITAL
EXPENDITURE AS INTERVENING VARIABLES IN REGENCY/CITY
GOVERNMENT IN ACEH PROVINCE
YEAR 2013-2017***

Neng Kamarni¹⁾, Chris Yohanes Ginting²⁾, Maulini Septya³⁾

¹⁾Universitas Andalas, Padang, Indonesia

²⁾Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³⁾Universitas Andalas, Padang, Indonesia

chrisyohanes@gmail.com

ABSTRAK: Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus merupakan jenis dana transfer yang diterima Pemerintah Aceh dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan sistem pemerintahannya. Dana transfer tersebut seharusnya dapat menjadi stimulus bagi perkembangan kemajuan daerah dan mendorong peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Aceh melalui pengalokasian belanja modal. Namun data dari Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukkan bahwa diantara provinsi-provinsi penerima dana otonomi khusus, yaitu Aceh, Papua Barat, dan Papua, Provinsi Aceh cenderung memiliki nilai pertumbuhan IPM yang paling rendah. Penelitian ini menganalisis dampak penerimaan dana perimbangan dan dana otonomi khusus terhadap perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memasukkan variable intervening yaitu belanja modal. Penelitian ini menggunakan populasi pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Aceh sebanyak 23 Kabupaten/Kota. Data yang menjadi rujukan merupakan data sekunder dengan rentang waktu selama 5 tahun (2014-2017). Data dianalisis dengan menggunakan regresi data panel dengan metode *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variable dana otonomi khusus, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Kemudian variable belanja modal tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh dana otonomi khusus dan dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia.

Kata Kunci: Dana Otonomi Khusus; Dana Perimbangan; Indeks Pembangunan Manusia

ABSTRACT: *The Balancing Fund and the Special Autonomy Fund are types of transfer funds received by the Aceh Government from the Central Government to run its governance system. The transfer funds should be able to become a stimulus for the development of regional progress and encourage increased human development in Aceh Province through the allocation of capital expenditures. However, data from the Central Bureau of Statistics (BPS) in 2020 shows that among the provinces receiving special autonomy funds, namely Aceh, West Papua, and Papua, Aceh Province tends to have the lowest HDI growth rates. This study analyzes the impact of the receipt of balancing funds and special autonomy funds on the development of the Human Development Index (IPM) by including the intervening variable, namely capital expenditure. This study uses a population of 23 districts/cities throughout Aceh Province. The reference data is secondary data with a time span of 5 years (2014-2017). The data were analyzed using panel data regression with the Moderated Regression Analysis (MRA) method. The results of the study show that the variables of special autonomy funds, profit sharing funds, general allocation funds, special allocation funds, and capital expenditures have a positive effect on the human development index. Then the capital*

expenditure variable is not significant in moderating the effect of special autonomy funds and general allocation funds on the human development index.

Keywords: *Special Autonomy Fund; Balancing Fund; Human Development Index*

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur bukan hanya dari sisi aspek pembangunan ekonomi saja, melainkan juga dari sisi aspek pembangunan manusianya. Kemampuan manusia atau penduduk dalam memperoleh akses kesehatan, pendidikan, dan pendapatan merupakan hasil dari aspek pembangunan manusia yang mampu dijelaskan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). United Nations Development Programme memperkenalkan dasar pemikiran terkait konsep pembangunan manusia (UNDP, 1990), yang menjelaskan konsep dimana manusia bukan hanya sebagai input dari pembangunan melainkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Pembangunan yang dilakukan pemerintah harus dapat menciptakan kondisi lingkungan yang mendorong masyarakat untuk berperilaku produktif, sehingga manusia dapat hidup lebih lama dan sehat, memiliki ilmu pengetahuan yang baik, dan memperoleh standar hidup yang layak. Tata cara perhitungan IPM yang baru mulai diimplementasikan di Indonesia pada tahun 2014, yang menyajikan informasi indikator- indikator pada IPM yaitu Umur Harapan Hidup/UHH, Harapan Lama Sekolah/HLS, Rata- rata Lama Sekolah/RLS, serta Pengeluaran per Kapita, di tingkatan nasional, provinsi, serta kabupaten/kota secara periodik pada tiap tahun. Indikator-indikator dalam komponen penghitungan IPM diimplimentasikan guna melihat tingkat keberhasilan suatu pembangunan kualitas hidup masyarakat/penduduk, dimana hal tersebut akan menjadi dasar indikator target pembangunan dalam menentukan dana transfer ke daerah (Badan Pusat Statistik, 2020)

Berdasarkan data BPS, nilai IPM pada 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh cenderung naik. Data tersebut disajikan pada Tabel 1 yang menunjukkan peningkatan nilai IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari 2013-2017. Berdasarkan Tabel 1, peningkatan IPM dengan rata-rata tertinggi di Provinsi Aceh adalah Kabupaten Aceh Timur dan Kota Sabang dengan nilai rata-rata sebesar 0,76. Untuk kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang menyandang status sebagai peningkatan IPM dengan nilai rata-rata rendah adalah Kabupaten Aceh Jaya dengan nilai rata-rata sebesar 0,29. Angka ini berada di bawah nilai rata-rata peningkatan IPM Indonesia untuk rentang waktu 2013- 2017 yang mencapai nilai rata-rata sebesar 0,90. Peningkatan IPM di Provinsi Aceh mengalami keadaan stagnan, meningkat namun tidak signifikan dan di bawah rata-rata peningkatan IPM secara nasional. Peningkatan yang cenderung lambat juga berpengaruh pada peringkat IPM Provinsi Aceh yang tidak meningkat (Saputra, 2014).

Tabel 1 Peningkatan Nilai IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 2013-2017(Dalam Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Peningkatan Nilai IPM				Rata-rata
	2014	2015	2016	2017	
Simeulue	0,50	0,98	0,66	0,59	0,68
Aceh Singkil	0,40	0,78	0,91	0,41	0,63
Aceh Selatan	0,08	0,93	0,85	0,90	0,69
Aceh Tenggara	0,35	0,87	0,71	0,61	0,64
Aceh Timur	0,30	0,98	0,87	0,90	0,76
Aceh Tengah	0,45	0,55	0,53	0,15	0,42
Aceh Barat	0,45	1,10	0,85	0,94	0,84
Aceh Besar	0,45	0,64	0,05	0,25	0,35
Pidie	0,28	0,81	0,38	0,46	0,48
Bireuen	0,48	1,06	0,44	0,90	0,72

Aceh Utara	0,57	0,92	0,34	0,48	0,58
Aceh Barat Daya	0,46	0,69	0,80	0,52	0,62
Gayo Lues	0,12	0,33	0,59	0,75	0,45
Aceh Tamiang	0,53	0,94	0,38	0,58	0,61
Nagan Raya	0,35	1,15	0,59	0,46	0,64
Aceh Jaya	0,38	0,23	0,17	0,37	0,29
Bener Meriah	0,26	0,62	0,80	0,47	0,54
Pidie Jaya	0,63	0,60	0,64	0,60	0,62
Kota Banda Aceh	0,38	1,03	0,48	0,22	0,53
Kota Sabang	0,43	1,01	0,85	0,74	0,76
Kota Langsa	0,41	0,93	0,67	0,48	0,62
Kota Lhokseumawe	0,31	0,67	0,67	0,56	0,55
Kota Subulussalam	0,28	0,93	0,86	0,70	0,69

Sumber: BPS Provinsi Aceh 2020, data diolah

Alokasi pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan dana transfer dari pusat kepada belanja daerah, memiliki peranan yang penting dalam upaya mendongkrak nilai IPM. Meningkatnya nilai IPM dapat terwujud apabila pemerintah daerah mampu mengalokasikan pendapatan daerah dan belanja daerah pada sektor-sektor penting yang menjadi komponen pembentuk nilai IPM, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Wahyu & Dwirandra, 2015). Sejalan dengan pemberlakuan desentralisasi saat ini, dimana pemerintah pusat melimpahkan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri (Pemerintah Indonesia, 2004). Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus jeli dalam menilai dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya, sehingga sumber daya tersebut dapat dialokasikan dengan tepat dan tujuan kesejahteraan masyarakat meningkat dapat tercapai.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Pemerintah Indonesia, 1999) tentang Pemerintahan Daerah, maka terbentuklah daerah-daerah otonom di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, termasuk Provinsi Aceh. Lebih unik lagi, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Pemerintah Indonesia, 2001) menetapkan Provinsi Aceh sebagai daerah otonomi khusus. Provinsi Aceh menerima dana otonomi khusus, dengan 40 persen masuk ke provinsi dan 60 persen ke pemerintah kabupaten/kota sebagai akibat dari status ini. Dana otonomi khusus difokuskan pembiayaannya untuk mengatasi masalah infrastruktur, ekonomi kerakyatan, kemiskinan, pendidikan, sosial, dan kesehatan (Cahyono, 2012).

Berikut data yang menyajikan realisasi dana otonomi khusus pada 24 kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2013-2017 (Tabel 2), dimana rata-rata dana otonomi khusus yang disalurkan per tahunnya sangat besar, nilai rata-rata terendah sebesar 65,50 Milyar untuk Kota Sabang dan nilai rata-rata tertinggi sebesar 218,85 Milyar untuk Kabupaten Aceh Timur. Dari data tersebut, terdapat fenomena yang muncul dimana Kota Sabang sebagai penerima rata-rata dana otsus terendah dan Kabupaten Aceh Timur sebagai penerima rata-rata dana otsus tertinggi, menghasilkan rata-rata peningkatan nilai IPM yang sama yaitu 0,76. Dana otsus sebagai sumber daya keuangan belum maksimal dikelola secara efektif dan efisien oleh pemerintah daerah di Aceh, sehingga belum berdampak secara merata pada sektor-sektor prioritas yang menjadi sasaran (Basri & Siti Nabiha, 2014).

Table 2 Rata-rata Realisasi Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 2013-2017
(Dalam Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Realisasi Dana Otonomi Khusus Aceh	Rata-rata
----------------	------------------------------------	-----------

	2013	2014	2015	2016	2017	
Simeulue	123,80	105,33	108,49	106,48	129,99	114,82
Aceh Singkil	130,74	113,75	116,34	116,38	118,14	119,07
Aceh Selatan	180,66	158,15	156,73	155,00	176,92	165,49

Kabupaten/Kota	Realisasi Dana Otonomi Khusus Aceh					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Aceh Tenggara	183,29	162,41	194,83	163,80	175,10	175,88
Aceh Timur	229,57	204,54	203,30	204,30	252,51	218,85
Aceh Tengah	171,80	151,55	153,03	155,58	166,83	159,76
Aceh Barat	137,81	126,03	125,45	120,03	145,17	130,90
Aceh Besar	164,97	148,68	147,92	145,49	165,69	154,55
Pidie	176,07	160,63	154,83	152,72	174,18	163,69
Bireuen	148,55	132,24	126,66	126,20	144,75	135,68
Aceh Utara	177,23	136,33	132,39	129,53	178,69	150,83
Aceh Barat Daya	128,14	111,02	111,44	111,68	126,40	117,74
Gayo Lues	187,74	195,02	200,86	198,09	212,14	198,77
Aceh Tamiang	146,90	133,95	126,83	133,12	149,38	138,04
Nagan Raya	146,71	145,83	145,85	140,10	183,47	152,39
Aceh Jaya	175,26	152,47	158,43	155,56	163,83	161,11
Bener Meriah	125,68	109,24	111,92	111,03	127,37	117,05
Pidie Jaya	106,85	94,22	96,64	94,65	98,26	98,12
Kota Banda Aceh	85,55	112,55	117,11	117,59	128,84	112,33
Kota Sabang	68,86	60,21	62,33	61,35	74,74	65,50
Kota Langsa	90,18	81,67	81,93	80,68	92,17	85,32
Kota Lhokseumawe	84,16	73,73	73,90	73,74	87,94	78,69
Kota Subulussalam	115,25	104,80	104,16	105,71	116,40	109,27

Sumber: Abrar (2018), data diolah

Selain otsus, Provinsi Aceh juga mendapat dana perimbangan yang merupakan dana transfer dari pemerintahan pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Jadi, selaku daerah otonom, Provinsi Aceh berhak atas pengelolaan keuangan sepenuhnya dana otonomi khusus dan dana perimbangan sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk mereduksi kesenjangan fiskal (Machfud et al., 2020). Berikut disajikan data terkait realisasi DAU, DAK, dan DBH di kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2013-2017 (Tabel 3). Sesuai data pada Tabel 3, Kabupaten Aceh Utara yang memperoleh rata-rata realisasi alokasi DAU, DAK, dan DBH tertinggi mencapai angka 1.323,54 Milyar per tahunnya, sementara untuk kabupaten dengan rata-rata realisasi alokasi DAU, DAK, dan DBH terendah yaitu Kota Subusallam dan Kota Sabang dimana angkanya tidak melebihi dari 500 Milyar. Apabila dibandingkan dengan nilai IPM, ada ketidaksesuaian pada Kabupaten Pidie dimana kabupaten tersebut termasuk dalam kategori nilai rata-rata peningkatan IPM yang rendah

di Provinsi Aceh, namun masuk dalam kategori mendapatkan rata-rata realisasi alokasi penyaluran DAU, DAK, dan DBH yang tinggimencapai 962,37 Milyar per tahunnya.

Tabel 3 Realisasi Penyaluran DAU, DAK, dan DBH pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh 2013-2017 (Dalam Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	DAU+DAK+DBH					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Simeulue	445,17	470,73	519,92	612,71	642,96	538,30
Aceh Singkil	424,34	457,27	616,10	649,48	585,88	546,61
Aceh Selatan	629,33	673,22	823,27	980,00	940,43	809,25
Aceh Tenggara	541,50	584,76	752,67	954,75	753,58	717,45
Aceh Timur	776,91	865,77	912,35	1.051,94	1.211,03	963,60
Aceh Tengah	589,61	641,57	774,77	1.013,92	878,42	779,66
Aceh Barat	610,30	646,40	673,70	752,61	781,67	692,94
Aceh Besar	781,64	779,75	859,95	1.057,38	964,15	888,57
Pidie	781,23	838,83	964,67	1.136,57	1.090,58	962,37
Bireuen	801,42	866,66	984,90	1.120,47	1.169,36	988,56
Aceh Utara	1.258,04	1.282,85	1.204,66	1.296,65	1.575,51	1.323,54
Aceh Barat Daya	456,23	497,47	622,33	735,98	631,53	588,71
Gayo Lues	459,31	488,36	631,51	710,19	583,25	574,52
Aceh Tamiang	563,37	615,03	724,11	863,88	766,18	706,51
Nagan Raya	560,71	604,83	621,19	650,96	648,37	617,21
Aceh Jaya	426,82	460,07	601,86	655,72	539,15	536,72
Bener Meriah	457,57	494,08	529,06	645,56	588,19	542,89
Pidie Jaya	429,03	469,17	599,88	677,27	565,96	548,26
Kota Banda Aceh	631,73	685,95	680,30	801,80	763,38	712,63
Kota Sabang	359,63	382,30	402,74	504,01	452,70	420,27
Kota Langsa	445,93	479,42	505,10	656,80	646,02	546,65
Kota Lhokseumawe	550,94	565,80	610,88	688,36	627,23	608,64
Kota Subulussalam	305,11	325,99	454,29	548,12	470,06	420,71

Sumber: BPS Provinsi Aceh 2017, data diolah

Karena kemampuan masing-masing daerah untuk memenuhi tuntutannya berbeda-beda, maka kemungkinan terjadinya ketimpangan anggaran antar daerah sangat besar. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menciptakan dana transfer dari APBN untuk mensubsidi belanja daerah sebagai dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH). DAU sebagian besar digunakan untuk pembiayaan yang berorientasi pada masyarakat, DAK terutama digunakan untuk program/kegiatan tertentu yang bersifat daerah dan selaras dengan prioritas nasional, dan DBH terutama digunakan untuk mengatasi ketimpangan fiskal dalam pelaksanaan otonomi daerah (Williantara & Budiasih, 2016).

Penerimaan daerah yang mencukupi diharapkan berdampak pada meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat yang dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Pendapatan daerah yang semakin besar seharusnya sejalan dengan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, dimana pengalokasian difokuskan pada sektor-sektor khusus seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kamudian menjadi penting

melihat bagaimana strategi alokasi belanja daerah berperan dalam meningkatkan IPM (Sari & Supadmi, 2016).

Nilai IPM akan dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh alokasi belanja yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas manusia, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Untuk meningkatkan aset, misalnya belanja modal, digunakan jenis alokasi belanja dalam belanja pemerintah daerah. Aset dalam ranah pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur yang terkait dengan pelayanan publik termasuk dalam penambahan aset. Akibatnya, penggunaan belanja modal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik akan berdampak pada kesejahteraan dan kualitas hidup manusia (IPM). Hal tersebut cukup membuktikan keterkaitan antara nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan belanja modal (Pituringasih & Irwan, 2015).

Tabel 4 menunjukkan data Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dari tahun 2013 hingga 2017. Terlihat di Tabel 4 bahwa Kabupaten Aceh Utara memiliki nilai rata-rata belanja modal tertinggi di antara kabupaten/kota Provinsi Aceh, dengan alokasi tahunan sebesar 372,91 miliar. Kota Sabang dengan nilai realisasi alokasi sebesar 122,50 miliar merupakan kabupaten/kota dengan rata-rata nilai belanja modal terendah. Jika realisasi alokasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) di Provinsi Aceh sudah sesuai, maka realisasi alokasi belanja modal di kabupaten/kota sudah memadai. Hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Kabupaten Aceh Utara menerima uang perimbangan paling banyak, sedangkan Kota Sabang sebagai penerima dana perimbangan terendah.

Tabel 4 Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2013-2017 (Dalam Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	Realisasi Belanja Modal					Rata-rata
	2013	2014	2015	2016	2017	
Simeulue	83,18	139,16	172,66	181,13	252,41	165,71
Aceh Singkil	115,93	181,03	359,33	306,41	208,15	234,17
Aceh Selatan	127,43	224,39	337,27	362,47	285,68	267,45
Aceh Tenggara	77,16	193,73	346,88	394,68	364,57	275,40
Aceh Timur	137,28	349,86	332,34	375,86	389,47	316,96
Aceh Tengah	128,03	251,97	384,85	512,06	341,77	323,74
Aceh Barat	123,33	228,65	271,82	298,45	307,03	245,85
Aceh Besar	99,92	208,46	263,66	398,72	300,97	254,34
Pidie	121,20	208,29	311,43	395,19	345,94	276,41
Bireuen	159,42	259,17	300,83	303,37	377,13	279,98
Aceh Utara	303,81	371,41	377,76	375,09	436,46	372,91
Aceh Barat Daya	102,67	141,46	255,10	377,70	291,68	233,72
Gayo Lues	131,34	228,35	346,11	385,70	222,98	262,90
Aceh Tamiang	83,19	228,54	366,30	347,58	304,67	266,05
Nagan Raya	153,87	349,08	399,15	332,80	389,32	324,84
Aceh Jaya	118,54	202,08	263,89	341,61	227,37	230,70
Bener Meriah	116,04	235,99	237,46	279,07	267,79	227,27
Pidie Jaya	102,10	186,26	311,66	302,36	188,27	218,13
Kota Banda Aceh	123,38	207,56	233,71	259,60	238,50	212,55
Kota Sabang	62,35	100,02	138,63	174,46	137,07	122,50
Kota Langsa	63,90	149,33	174,55	294,38	336,02	203,64
Kota Lhokseumawe	119,23	167,46	223,02	235,99	193,66	187,87

Kota Subulussalam	67,90	151,04	166,15	353,15	227,95	193,24
-------------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Sumber: BPS Provinsi Aceh 2017, data diolah

Berdasarkan uraian di atas, terdapat keterkaitan antara alokasi belanja modal dengan nilai IPM dan dana transfer dalam bentuk dana otsus dan dana perimbangan sebagai salah satu bentuk desentralisasi fiskal. Hal ini sesuai dengan teori federalisme fiskal, yang menjelaskan hubungan antara desentralisasi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Teori federalisme fiskal adalah teori yang menjelaskan keterkaitan keuangan antara tingkat pemerintahan dengan membandingkan dan mengkontraskan kebutuhan dan prioritas pemerintah pusat dan daerah. Hipotesis ini diduga berasal dari negara-negara yang menggunakan konsep desentralisasi fiskal. Teori federalisme fiskal membahas tentang desentralisasi fiskal, atau pendelegasian kekuasaan untuk mengurus daerahnya sendiri, sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang diinginkan daerah, akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai (Sumardjoko & Irwanto, 2015).

Teori lain yang mendukung hal ini adalah gagasan agensi (*agency theory*). Teori ini menjelaskan hubungan keagenan yang muncul ketika satu orang atau lebih (*principals*) menyewa agen (*agent*) untuk memberikan suatu layanan, dan *principal* kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agen*. Hubungan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat digunakan untuk mengimplementasikan teori keagenan di sektor publik. Pemerintah Pusat menyusun anggaran kemudian mentransfer dan mendelegasikan wewenang penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah. Sebagaimana kontrak, terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi masing-masing pihak yaitu eksekutif, legislatif, dan publik, dimana hal tersebut dikenal sebagai peraturan atau undang-undang. Pendelegasian wewenang tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah sebagai pihak eksekutif untuk mengalokasikan anggaran dan menyusunnya dalam dokumen APBD yang kemudian didiskusikan bersama-sama dengan legislatif agar menjadi suatu peraturan daerah yang baik. Ini merupakan wujud kesepakatan antara legislatif dan eksekutif dalam hal monitoring terhadap penggunaan anggaran. Pola yang dilakukan tersebut merupakan pelaksanaan kontrak yang mendukung perspektif teori keagenan (Zelmiyanti, 2016).

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba menguji keterkaitan IPM dengan variabel-variabel seperti DAU, DAK, DBH, Dana Otonomi Khusus, maupun Belanja Modal secara parsial dan dengan hasil yang berbeda-beda. Di Provinsi Kalimantan Tengah, Siburian et al., 2021 melihat dampak Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia tahun 2011-2018. Menurut temuannya, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Ukuran Pemerintah Daerah semua memiliki dampak yang positif pada IPM. Sementara Dana Bagi Hasil berdampak negatif terhadap IPM, sedangkan Dana Alokasi Umum berdampak kecil atau tidak signifikan. Temuan penelitian Fatimah & Priyono, 2020 tentang kontribusi PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah dari tahun 2016 hingga 2018 mengungkapkan sebaliknya. Variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang dievaluasi oleh IPM, menurut hasil pengolahan dan analisis data. Di Jawa Tengah, hasil pengujian variabel DBH dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap skor IPM.

Penelitian terkait Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, dan Indeks Pembangunan Manusia: Panel Bukti Data Empat Kabupaten Aceh oleh Ariyati et al., 2018 menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM. Artinya, dengan meningkatnya belanja modal maka IPM juga meningkat, namun peningkatannya tidak sebesar peningkatan belanja modal. Setelah itu, Hobrouw et al., 2021 melakukan penelitian tentang Pengaruh Belanja Modal dan PAD terhadap IPM di Provinsi Papua Barat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Belanja Modal dan PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat. Kemudian, Pradnyantari & Dwirandra, 2017, meneliti pengaruh PAD dan belanja modal terhadap IPM di kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan DAU sebagai variabel moderator, dimana ditemukan sesuatu yang cukup berbeda pada rentang waktu 2010-2015. Temuan pengujian malah menunjukkan bahwa belanja

modal dapat menurunkan nilai IPM dikarenakan pengelolaan belanja modal yang mengalami kegagalan, misalnya terjadi kasus mangkraknya pembangunan.

Daerah dengan IPM yang rendah memiliki kualitas hidup yang rendah dan kualitas pembangunan manusia yang rendah, menunjukkan kegagalan desentralisasi. Menurut penelitian yang dilakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat, wilayah-wilayah yang mendapatkan dana otsus dengan transfer uang yang masif memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih rendah. IPM, pendapatan per kapita provinsi, dan tingkat kemiskinan semuanya secara konsisten lebih rendah dari angka rata-rata nasional (Juliarini, 2018). Menurut Cahyono, 2012, pemanfaatan dana otsus di Provinsi Aceh juga mengalami hal yang sama, dimana pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat belum mengalami peningkatan. Terlihat dari data BPS, dimana angka IPM nasional selalu berada di atas angka IPM di Provinsi Aceh (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2018).

Berdasarkan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, fenomena peningkatan nilai IPM Aceh yang selalu berada di bawah nilai IPM nasional, dan masih jarang nya penelitian yang menggabungkan variabel dana perimbangan dan dana otonomi khusus dalam mempengaruhi nilai IPM, membuat peneliti tertarik ingin menguji apakah Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus berdampak terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh dengan memasukkan Belanja Modal sebagai *variabel intervening*. Pertanyaan penelitian adalah (1) apakah Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. (2) apakah Dana Otsus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota Provinsi Aceh. (3) apakah Belanja Modal dapat memoderasi dampak Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

TINJAUAN PUSTAKA

Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan DBH)

Dana perimbangan adalah uang dari APBN yang dikirim ke daerah dengan tujuan memperkecil kesenjangan pendanaan antara pusat dan daerah berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 (Pemerintah Indonesia, 2005). Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah contoh dana perimbangan. Tujuan dari masing-masing jenis dana perimbangan tersebut berbeda-beda dalam perwujudan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Penggunaan DAU berfokus pada kesetaraan kekuatan pendanaan masing-masing daerah, agar kesenjangan pendanaan antar daerah dapat berkurang dan pembangunan berdasarkan potensi dan kebutuhan daerah (Harahap, 2011). Untuk penggunaan DAK lebih difokuskan kepada pendanaan program/kegiatan khusus yang berkaitan dengan pemerintahan, misalnya untuk pendanaan pada fasilitas pendidikan dan kesehatan (Raviyanti et al., 2017). Sementara untuk penggunaan DBH pembiayaan belanja daerah yang memiliki potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DBH dialokasikan dengan dasar perhitungan persentase alokasi APBN (Williantara & Budiasih, 2016).

Dana Otonomi Khusus

Pemerintah Aceh telah mendapatkan alokasi Dana Otonomi Khusus dari tahun 2008 hingga 2022 (20 tahun), sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur tentang Pemerintah Aceh (Pemerintah Indonesia, 2006). Untuk periode 2008-2022, dana otonomi khusus akan ditetapkan sebesar 2% dari DAU Nasional. Sementara itu, pagu besaran dana tersebut akan dikurangi sebesar 1% dari DAU Nasional untuk jangka waktu berikutnya, 2023-2028. Provinsi Aceh menerima Dana Otonomi Khusus sesuai dengan status daerahnya sebagai daerah otonomi khusus, yang dibagi dengan Provinsi Papua dan Papua Barat. Pemanfaatan dana otonomi khusus Aceh untuk mendanai pembangunan, khususnya infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan sumber pendapatan alternatif un masalah sosial dan kesehatan (Adnan, 2021).

Belanja Modal

Belanja modal mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan pembangunan, baik langsung maupun tidak langsung, seperti infrastruktur dan investasi. Kategori belanja modal meliputi belanja untuk pembelian tanah, bangunan, dan struktur, serta belanja peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya (Sandri et al., 2016).

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur kemampuan penduduk untuk mencapai hasil pembangunan seperti pendapatan, kesehatan, dan pendidikan (Badan Pusat Statistik, 2020). IPM dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu negara atau wilayah maju, berkembang, atau terbelakang, serta untuk mengukur keuntungan ekonomi dari peningkatan kualitas hidup. Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita merupakan komponen pembentuk IPM yang diukur pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota setiap tahun.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan *moderated regression analysis* untuk melihat dampak Dana Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan belanja Modal sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan adalah data Realisasi Dana Otonomi Khusus, Realisasi Dana Bagi Hasil, Realisasi Dana Alokasi Umum, Realisasi Dana Alokasi Khusus, Realisasi Belanja Modal, dan Indeks Pembangunan Manusia untuk 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2013-2017 yang terdapat pada publikasi yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut kemudian ditransformasi ke dalam logaritma natural dengan tujuan mengurangi terjadinya kemiringan dalam distribusi datanya.

Untuk model regresi data panel yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$\text{IndeksPembangunanManusia} = a + b_1 \text{DanaOtonomiKhusus} + b_2 \text{DanaBagihasil} + b_3 \text{DanaAlokasiUmum} + b_4 \text{DanaAlokasi Khusus} + b_5 \text{BelanjaModal} + e$$

Moderated regression analysis nantinya akan digunakan untuk melihat pengaruh variabel belanja modal sebagai variabel moderasi. Adapun model yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$\text{IndeksPembangunanManusia} = a + b_1 \text{DanaOtonomiKhusus} + b_2 \text{DanaBagihasil} + b_3 \text{DanaAlokasiUmum} + b_4 \text{DanaAlokasiKhusus} + b_5 \text{BelanjaModal} + b_6 (\text{DanaOtonomiKhusus} * \text{BelanjaModal}) + b_7 (\text{DanaBagihasil} * \text{BelanjaModal}) + b_8 (\text{DanaAlokasiUmum} * \text{BelanjaModal}) + b_9 (\text{DanaAlokasiKhusus} * \text{BelanjaModal}) + e$$

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Spesifikasi Model

Regresi data panel memiliki tiga model yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model* (Widarjono, 2007). Dari ketiga model ini, akan dipilih model yang terbaik dengan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier.

Tabel 5 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	283.911529	(22,87)	0.0000

Cross-section Chi-square 493.077414 22 0.0000

Uji Chow dilakukan untuk memilih antara *common fixed model* dengan *fixed effect model*. Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai *cross-section chi-square* lebih kecil dari 0,05, yaitu 0,0000 artinya model yang terpilih adalah *fixed effect model*. Kemudian pemilihan dilanjutkan antara *fixed effect model* dengan *random effect model* dengan menggunakan uji Hausman.

Tabel 6 Hasil Uji Hausman

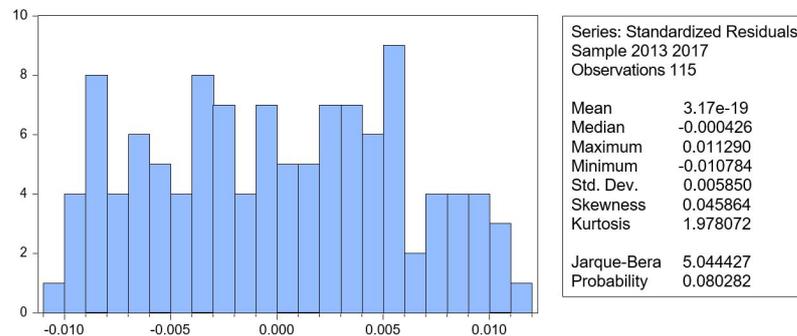
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq.d.f.	Prob.
Cross-section random	53.425614	5	0.0000

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai *cross-section random* lebih kecil dari 0,05, artinya yang terpilih adalah *fixed effect model*. Uji Lagrange Multiplier tidak perlu dilakukan lebih lanjut karena pada Uji Hausman. sehingga *fixed effect model* kembali terpilih. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *fixed effect model* menjadi model terbaik dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Selanjutnya, kita melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Menurut (Damodar N. Gujarati & Dawn C. Porter, 2008), uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan hasil penelitian tidak bias, konsisten, dan efisien dalam penaksiran koefisien regresinya. Berdasarkan uji normalitas, variabel-variabel penelitian dinyatakan berdistribusi normal. Terlihat pada gambar di bawah dan pada nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05, yaitu, 0,080282.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



Uji asumsi klasik selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Terlihat dari tabel dibawah ini bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Nilai yang dihasilkan tidak ada yang lebih dari 0,9.

Tabel 7. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3	X4	M
X1	1.000000	0.171613	0.513290	0.285451	0.338138
X2	0.171613	1.000000	0.359761	-0.189461	0.009592
X3	0.513290	0.359761	1.000000	0.447801	0.564089

X4	0.285451	-0.189461	0.447801	1.000000	0.766946
M	0.338138	0.009592	0.564089	0.766946	1.000000

Terlihat dari tabel dibawah ini bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Nilai yang dihasilkan tidak ada yang lebih dari 0,9. Lebih lanjut dilakukan uji heteroskedastisitas dengan metode Gletjser. Didapatkan bahwa, terjadinya heteroskedastisitas sehingga untuk mengatasinya salah satunya adalah dengan menggunakan metode *Weighted Least Square* (Damodar N. Gujarati & Dawn C. Porter, 2008). Uji asumsi klasik yang terakhir adalah uji autokorelasi. Terlihat pada table di bawah bahwa tidak terdapat autokorelasi pada variable-variabel penelitian.

Uji Hipotesis dan Signifikansi Moderasi

Uji Hipotesis

Tabel 8 Hasil Estimasi Ficed Random Effect

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.372830	0.468368	0.796020	0.4282
X1	0.044753	0.007931	5.642858	0.0000
X2	-0.010952	0.004897	-2.236440	0.0279
X3	0.109289	0.015587	7.011511	0.0000
X4	0.005851	0.001444	4.050308	0.0001
M	-0.004655	0.002701	-1.723547	0.0883

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
Weighted Statistics			
R-squared	0.995749	Mean dependent var	5.116385
Adjusted R-squared	0.994430	S.D. dependent var	1.863502
S.E. of regression	0.006696	Sum squared resid	0.003901
F-statistic	754.7713	Durbin-Watson stat	2.082505
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari tabel di atas terlihat bahwa variabel dana otonomi khusus, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus secara parsial berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Hanya variabel belanja modal saja yang tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Sementara itu, secara bersama-sama, semua variabel independen berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dengan Prob(F-statistic) yang nilainya lebih kecil dari 0,05. Terakhir adalah uji determinasi, yaitu dengan melihat besaran nilai *Adjusted R-squared*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adjusted R-squared bernilai sebesar 0,994430, yang artinya bahwa variabel danaotonomi khusus, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanjamodal secara bersama-sama dapat menjelaskan indeks pembangunan manusia sebesar 99,44%, sementara 0,56% dijelaskan oleh faktor lain.

Uji Signifikansi Moderasi

Berikut hasil pengujian signifikansi belanja modal dalam memoderasi pengaruh dana otonomi khusus, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap indeks indeks pembangunan manusia dengan menggunakan uji interaksi.

Tabel 9. Hasil Uji Signifikansi Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.888078	4.301527	-0.903883	0.3685
X1	0.289449	0.167428	1.728795	0.0873
M	0.245736	0.165010	1.489224	0.1400
X1*M	-0.008546	0.006424	-1.330480	0.1868
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.989036	Mean dependent var		5.192958
Adjusted R-squared	0.985956	S.D. dependent var		2.541093
S.E. of regression	0.009555	Sum squared resid		0.008126
F-statistic	321.1415	Durbin-Watson stat		1.754940
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai probabilitas interaksi X1*M lebih besar dari 0,05, yaitu $0,1868 > 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa belanja modal tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh dana otonomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia.

Tabel 10 Hasil Uji Signifikansi Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.28671	2.298319	4.475754	0.0000
X2	-0.258250	0.094538	-2.731695	0.0076
M	-0.199122	0.086507	-2.301800	0.0237
X2*M	0.008521	0.003562	2.391903	0.0189
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.985101	Mean dependent var		4.933753
Adjusted R-squared	0.980916	S.D. dependent var		1.629391
S.E. of regression	0.009217	Sum squared resid		0.007561
F-statistic	235.3821	Durbin-Watson stat		1.730152
Prob(F-statistic)	0.000000			

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai probabilitas interaksi X2*M lebih kecil dari 0,05, yaitu $0,0189 < 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa belanja modal signifikan dalam memoderasi pengaruh dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia.

Tabel 11 Hasil Uji Signifikansi Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Indeks Pembangunan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.264640	3.446489	1.237387	0.2192
X3	-0.000699	0.128331	-0.005443	0.9957
M	-0.157425	0.132591	-1.187301	0.2383
X3*M	0.005813	0.004928	1.179556	0.2413
Effects Specification				

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai probabilitas interaksi X3*M lebih besar dari 0,05, yaitu $0,2413 > 0,05$, sehingga dapat dinyatakan bahwa belanja modal tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia.

Tabel 12 Hasil Uji Signifikansi Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.280215	1.593087	-0.175894	0.8608
X4	0.172031	0.064167	2.681003	0.0087
M	0.159287	0.060401	2.637151	0.0099
X4*M	-0.006063	0.002430	-2.494859	0.0144
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Weighted Statistics				
R-squared	0.994755	Mean dependent var	5.015407	
Adjusted R-squared	0.993282	S.D. dependent var	2.010607	
S.E. of regression	0.009064	Sum squared resid	0.007312	
F-statistic	675.2403	Durbin-Watson stat	1.728894	
Prob(F-statistic)	0.000000			

ross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.989790	Mean dependent var	5.167434
Adjusted R-squared	0.986921	S.D. dependent var	1.817405
S.E. of regression	0.008104	Sum squared resid	0.005845
F-statistic	345.1032	Durbin-Watson stat	2.299527
Prob(F-statistic)	0.000000		

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai probabilitas interaksi $X_4 * M$ lebih kecil dari 0,05, yaitu $0,0144 < 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa belanja modal signifikan dalam memoderasi pengaruh dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia.

D. PENUTUP

Berdasarkan pengujian hipotesis dan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dana Otonomi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sementara itu, Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Untuk Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pada uji simultan disimpulkan bahwa, Dana Otonomi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal, secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Terakhir, Untuk uji moderasi, Belanja Modal hanya mampu memoderasi pengaruh Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adnan. (2021). Perkembangan Dana Otonomi Khusus Aceh 2008-2019. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 11(2), 103–109.
- Ariyati, N., Rahayu, F., Amalia, N. R., Nurhaliza, S., Ghufrani, T. M., Adi, A. R., & Jalaluddin, J. (2018). Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia: Panel Data Evidence Empat Kabupaten di Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 9(1), 92–103. <https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.465>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Indeks Pembangunan Manusia 2020*. Badan Pusat Statistik: Jakarta
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2018). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh 2013-2017*. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh: Aceh
- Basri, H., & Siti Nabihah, A. K. (2014). Accountability of Local Government: The Case of Aceh Province, Indonesia. *Asia Pacific Journal of Accounting and Finance*, 3(1), 1–14.
- Cahyono, H. (2012). Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh: Gagal Menyejahterakan Rakyat dan Sarat Konflik Internal. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(2), 1–22. <http://centraldemokrasi.com>
- Damodar N. Gujarati, & Dawn C. Porter. (2008). *The McGraw-Hill Series Economics*.
- Fatimah, A. N., & Priyono, N. (2020). Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, 4(2), 75–92. <https://doi.org/10.33021/jaaf.v4i2.1073>
- Harahap, R. U. (2011). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kab./Kota Propinsi*

- Sumatera Utara. 11(1), 47–58.
- Hobrouw, Y. A., Suaryana, I. G. N. A., & Putri, I. G. A. M. A. D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja M Odal, dan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Journal Akuntansi Universitas Cenderawasih*, 31(2), 401–413.
- Juliarini, A. (2018). Kinerja Pendapatan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Studi Kasus Provinsi Di Pulau Jawa. In *Simposium Nasional Keuangan Negara*. <https://doi.org/10.32834/gg.v15i1.99>
- Machfud, M., Asnawi, A., & Naz'aina, N. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Tingkat Kemiskinan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. *J-MIND (Jurnal Manajemen Indonesia)*, 5(1), 14. <https://doi.org/10.29103/j-mind.v5i1.3423>
- Pemerintah Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. In *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 11 Tahun 2001*. Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. In *DPR*. Sekretaris Negara Republik Indonesia. <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Pemerintah Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*. In *09 Desember*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/49713/pp-no-55-tahun-2005>
- Pemerintah Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Pituringsih, E., & Irwan, M. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui Belanja Modal. *ASSETS*, 5(2), 1–12.
- Pradnyantari, P. M., & Dwirandra, A. A. N. B. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada IPM dengan Variabel Pemoderasi Dana Alokasi Umum. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(1), 536–564.
- Raviyanti, A. A., Rahayu, S., & Mahardika, D. P. K. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap IPM dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2009 -2013). *Jurnal Manajemen*, 22(2), 243–256. <https://doi.org/10.24912/je.v22i2.224>
- Sandri, N. K., Ayu, I. G., Asri, M., Putri, D., & Dwirandra, A. A. N. B. (2016). Kemampuan Alokasi Belanja Modal Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Indeks Pembangunan Manusia. *Buletin Studi Ekonomi*, 21(1), 71–81.
- Saputra, M. H. (2014). Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Quantitative Economics Journal*, 3(4). <https://doi.org/10.24114/qej.v3i4.17458>
- Sari, I. A. C. Y., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), 2409–2438.
- Siburian, M. T., Abdullah, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011—2018. *Tirtayasa Ekonomika*, 16(1). <https://doi.org/10.35448/jte.v16i1.11149>

- Sumardjoko, I., & Irwanto, A. (2015). Peran Transfer Dana Penyesuaian dan Dana Perimbangan terhadap Peningkatan Belanja Modal Daerah untuk Menciptakan Quality Spending. *Simposium Nasional Akuntansi 18*, 1–23.
- Wahyu, I. P. A., & Dwirandra, A. A. N. . (2015). Kemampuan Belanja Modal Memoderasi Pengaruh PAD, DAU, DAK dan SiLPA pada IPM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 12(3), 546–565.
- Widarjono, A. (2007). *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis, edisi kedua*. Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia.
- Williantara, G. F., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16(3), 2044–2070.
- Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan pada Kinerja Keuangan Daerah dan Belanja Modal (Studi pada Provinsi di Indonesia). *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan (JRAK)*, 7(1), 11–21.